

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat suatu kebijakan yang berbentuk (penerapan hukum dan undang-undang) di daerah tertentu. Secara arti luas pemerintah adalah aparatur negara yang meliputi tentang organ-organ, badan atau lembaga, alat kelengkapan negara yang meliputi berbagai aktivitas untuk mencapai suatu tujuan negara (Pemerintah, 2013). Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus dapat memberikan pelayanan yang sangat cepat dan tepat agar masyarakat merasakan kepuasan terhadap pelayanan publik yang diberikan pemerintah (Sampara Lukman 2000). Pelayanan publik di Indonesia adalah salah satu permasalahan yang sangat besar karena pemerintah belum maksimal dalam memberikan pelayanan publik.

Pelayanan publik yaitu kegiatan yang memberikan kebutuhan terhadap warga negara atas suatu barang, jasa atau pelayan administrasi yang telah disediakan oleh penyelenggara, terkait dengan kepentingan publik. Penyelenggara pelayan publik diselenggarakan oleh lembaga dan petugas pelayanan publik, seperti pemerintah daerah atau Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik. (Hardiansyah 2011). Fungsi paling dasar di pemerintahan yaitu menyelenggarakan pelayanan publik. Pelayanan administratif yaitu pelayanan yang sudah ada. Pada Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan pemerintah harus

menekankan kepada masyarakat luas agar di era desentralisasi pada saat ini masyarakat desa memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan public yang terbuka, efisien, efektif dan bertanggung jawab.

Permasalahan yang terjadi di negara ini seperti pelayanan publik yang kurang memadai dan pelayanannya kurang cepat, factor-faktor yang menyebabkan pelayanan publik di negara ini belum berjalan sesuai dengan apa yang dicitakan, seperti infrastruktur yang belum memadai dan pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik belum terlalu serius dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik. (Pramusinto & Kumorotomo:2009).

Pada era globalisasi ini pemerintah harus mengikuti perkembangan teknologi karena perkembangan teknologi saat ini berpengaruh terhadap kemajuan suatu negara. Akibat perkembangan teknologi tersebut mengharuskan pemerintah untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi salah satu upaya yang dilakukan adalah *E-government*. *E-government* merupakan suatu proses sistem pemerintahan dengan memanfaatkan ICT (*Information, Communication and Technology*) sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi kepada warga masyarakat, organisasi bisnis dan lembaga pemerintah serta stafnya. Hartono (2010)

Sistem Informasi Desa (SID) adalah kumpulan dari berbagai teknologi informasi yang dapat di operasikan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kecepatan dalam kualitas pelayanan publik kepada masyarakat desa dan keberadaan Sistem Informasi Desa (SID) mendapat respon yang baik terhadap masyarakat luas karena sangat membantu dan mempercepat pelayanan terhadap

masyarakat (Dewi, 2011:99). Desa menjadi salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang dapat mengubah suatu kondisi masyarakat daerah yang baik di berbagai aspek kehidupan (Kantor Pengelolaan Data Telekomunikasi, 2016).

Program SID pertama kali dirintis dan diperkenalkan pada tahun 2010 oleh *Combine Resources Institution* (CRI). Sistem Informasi Desa (SID) memiliki pengertian yang sempit dan luas. SID dalam arti sempit yaitu suatu aplikasi yang membantu pemerintah desa dalam mengelola data-data atau mendokumentasikan data desa, dalam arti luas, SID merupakan suatu rangkaian sistem yang bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ada di komunitas (Ranggoini Jahja dik, 2012:19). Dalam arti luas SID dapat dimaknai sebagai alat bertukar informasi dan komunikasi antara masyarakat desa dengan aparat desa dan Juga dapat meningkatkan manajemen perekonomian desa dengan melalui penguatan kerja sama antar desa.

Sistem Informasi Desa (SID) memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat berkembangnya media baru. Beberapa faktor karakteristik yang sangat melekat dalam era media baru menurut (Littlejohn, 2009:413) diantaranya desentralisasi, di luar arah, di luar kendali situasi, demokratisasi, mengangkat kesadaran individu, orientasi individu.

Keberadaan SID sebagai suatu program yang dapat digunakan secara *Online* ataupun *Offline* memiliki karakteristik tersebut. Pergeseran masyarakat terjadi ketika munculnya adopsi terhadap teknologi digital, yang merupakan tahap

ketika terjadi perubahan besar dari cara manusia melakukan interaksi dengan manusia lain melalui media (Simanungsong, 2011).

Desa tepat untuk sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang dapat mengubah suatu kondisi masyarakat kearah yang lebih milenial. Berdasarkan data dari (Kantor Pengelolaan Data Telekomunikasi, 2016) pada tahun 2015, desa di Kabupaten Bantul telah memiliki Sistem Informasi Desa (SID) dari keseluruhan total 75 desa yang ada, terdapat 12 desa yang menerapkan Sistem Informasi Desa (SID). Pemerintah juga membuka peran dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, dan *workshop* juga dilakukan pemerintah Kabupaten Bantul yang telah bekerja sama dengan lembaga *Combine Resources Institution* (CRI).

Keberadaan teknologi informasi dalam membantu pelayanan masyarakat di pedesaan sangat penting namun hal itu tidak akan berarti tanpa adanya partisipasi masyarakat tersebut. Dengan adanya partisipasi masyarakat terhadap Sistem Informasi Desa (SID) maka target utama keberadaan aplikasi tersebut sangatlah membantu dalam hal informasi yang lebih luas dan sebagai warga kita juga bisa memberikan dukungan dengan cara mengawasi transparansi informasi. Tanpa dukungan masyarakat Sistem Informasi Desa (SID) ini tidak akan bermakna karena masyarakat tidak merasa memiliki. (Dibyorin, 2013).

Efektivitas merupakan dimensi produktivitas hasil yang mengarah pada keberhasilan kerja yang maksimal yang telah mencapai target secara kuantitas, kualitas, dan waktu. (Pasolong 2007 : 4). Keberhasilan suatu organisasi yang harus dipertimbangkan antara sasaran organisasi dan mekanisme mempertahankan dalam mengejar sasaran dua hal tersebut bisa diimbangi, penilai dari efektivitas

berkaitan dengan masalah sasaran dan tujuan yang direncanakan (Georgopolous dan Tannenbaum 1985 : 50).

Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) di Kabupaten Bantul yang sudah berjalan dari tahun 2014 masih kurang optimal. Hal ini masih terlihat dari perkembangan website desa dimana dari 75 desa baru ada sekitar 12 desa yang aktif menggunakan atau mengupdate konten yang menggunakan SID. Salah satu yang aktif dalam mengunggah konten di Kabupaten Bantul yaitu di Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul dan pada tahun 2016 Desa Murtigading menjadi *pilot project* di Bantul yang salah satu menerapkan Sistem Informasi Desa (SID). Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) digunakan untuk mempermudah masyarakat Desa Murtigading untuk mengetahui aktifitas atau kegiatan yang di lakukan oleh Pemerintah. (Bantul, 2017).

Dilansir dari Jogjadaily bahwa di Desa Murtigading membutuhkan Sistem Informasi Desa itu sendiri karena di era keterbukaan informasi publik, pembangunan SID memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dibidang *Information Technology* (IT) dan sarana dan prasarananya. Kepala Diskominfo ingin mewujudkan *Good Governance* merupakan salah satu agenda pokok reformasi yang dapat diharapkan secara konsisten oleh pemerintah.

Tabel 1. Daftar 75 Desa di Bantul yang menerapkan Sistem Informasi Desa

No	Kecamatan	Desa	Alamat URL
1	Srandakan	Poncosari	http://poncosari.bantulkab.go.id
2	Srandakan	Trimurti	http://trimurti-bantul.desa.id
3	Sanden	Gadingsari	http://gadingsari.bantulkab.go.id
4	Sanden	Gadingharjo	http://gadingharjo.bantulkab.go.id
5	Sanden	Srigading	http://srigading.bantulkab.go.id
6	Sanden	Murtigading	http://murtigading.bantulkab.go.id
7	Kretek	Tirtomulyo	http://tirtomulyo-bantul.desa.id
8	Kretek	Parangtritis	http://parangtritis.bantulkab.go.id
9	Kretek	Donotirto	http://donotirto.bantulkab.go.id
10	Kretek	Tirtosari	http://tirtosari-bantul.desa.id
11	Kretek	Tirtoharjo	http://tirtoharjo.bantulkab.go.id
12	Pundong	Seloharjo	http://seloharjo.bantulkab.go.id
13	Pundong	Panjangrejo	http://panjangrejo-bantul.desa.id
14	Pundong	Srihardono	http://srihardono.bantulkab.go.id
15	Bambanglipuro	Sidomulyo	http://sidomulyo-bantul.desa.id
16	Bambanglipuro	Mulyodadi	http://mulyodadi.bantulkab.go.id
17	Bambanglipuro	Sumbermulyo	http://sumbermlyo.bantulkab.go.id
18	Pandak	Caturharjo	http://caturharjo.bantulkab.go.id
19	Pandak	Triharjo	http://triharjo.bantulkab.go.id
20	Pandak	Wijirejo	http://wijirejo.bantulkab.go.id
21	Pandak	Gilangharjo	http://gilangharjo.bantulkab.go.id

22	Pajangan	Triwidadi	http://triwidadi.bantulkab.go.id
23	Pajangan	Sendangsari	http://sendangsari.bantulkab.go.id
24	Pajangan	Guwosari	http://guwosari-bantul.desa.id
25	Bantul	Palbapang	http://palbapang.bantulkab.go.id
26	Bantul	Ringinharjo	http://ringinharjo.bantulkab.go.id
27	Bantul	Bantul	http://bantul.bantulkab.go.id
28	Bantul	Trirenggo	http://trirenggo.bantulkab.go.id
29	Bantul	Sabdodadi	http://sabdodadi.bantulkab.go.id
30	Jetis	Patalan	http://patalan.bantulkab.go.id
31	Jetis	Canden	http://canden.bantulkab.go.id
32	Jetis	Sumberagung	http://sumberagung.bantulkab.go.id
33	Jetis	Trimulyo	http://trimulyo.bantulkab.go.id
34	Imogiri	Selopamiro	http://selopamiro.bantulkab.go.id
35	Imogiri	Sruharjo	http://sriharjo.bantulkab.go.id
36	Imogiri	Wukirsari	http://wukisari.bantulkab.go.id
37	Imogiri	Kebonagung	http://kebonagung-bantul.desa.id
38	Imogiri	Karangtengah	http://karangtengah.bantulkab.go.id
39	Imogiri	Girirejo	http://girirejo.bantulkab.go.id
40	Imogiri	Karangtalun	http://karangtalun.bantulkab.go.id
41	Imogiri	Imogiri	http://imogiri.bantulkab.go.id
42	Dlingo	Mangunan	http://mangunan.bantulkan.go.id
43	Dlingo	Muntutuk	http://muntutuk.bantulkab.go.id

44	Dlingo	Dlingo	http://dlingo-bantul.desa.id
45	Dlingo	Temuwuh	http://temuwuh.bantulkab.go.id
46	Dlingo	Terong	http://terong-bantul.desa.id
47	Dlingo	Jatimulyo	http://jatimulyo.bantulkab.go.id
48	Banguntapan	Baturetno	http://baturetno-bantul.desa.id
49	Banguntapan	Banguntapan	http://banguntapan.bantulkab.go.id
50	Banguntapan	Jagalan	http://jagalan.bantulkab.go.id
51	Banguntapan	Singosaren	http://singosaren.bantulkab.go.id
52	Banguntapan	Jambidan	http://jambidan.bantulkab.go.id
53	Banguntapan	Potorono	http://jambidan.bantulkab.go.id
54	Banguntapan	Tamanan	http://tamanan.bantulkab.go.id
55	Banguntapan	Wirokerten	http://wirokerten.bantulkab.go.id
56	Pleret	Wonokromo	http://wonokromo.bantulkab.go.id
57	Pleret	Pleret	http://pleret-bantul.desa.id
58	Pleret	Segoroyoso	http://segoroyoso.bantulkab.go.id
59	Pleret	Bawurah	http://bawuran-bantul.desa.id
60	Pleret	Wonolelo	http://wonolelo.bantulkab.go.id
61	Piyungan	Sitimulyo	http://sitimulyo.bantulkab.go.id
62	Piyungan	Srimulyo	http://srimulyo-bantul.desa.id
63	Piyungan	Srimartani	http://srimartani.bantulkab.go.id
64	Sewon	Pendowoharjo	http://pendowoharjo.bantulkab.go.id
65	Sewon	Timbulharjo	http://timbulharjo.bantulkab.go.id
66	Sewon	Bangunharjo	http://bangunharjo.bantulkab.go.id

67	Sewon	Panggunharjo	http://panggunharjo.desa.id
68	Kasih	Bangunjiwo	http://bangunjiwo-bantul.desa.id
69	Kasih	Tirtonirmolo	http://tirtonimolo.bantulka.go.id
70	Kasih	Tamantirto	http://tamantirto.bantulkab.go.id
71	Kasih	Ngestiharjo	http://ngestiharjo.bantulkab.go.id
72	Sedayu	Argodadi	http://argodadi.bantulkab.go.id
73	Sedayu	Argorejo	http://argorejo.bantulkab.go.id
74	Sedayu	Argosari	http://argosari.bantulkab.go.id
75	Sedayu	Argomulyo	http://argomulyo.bantulkab.go.id

Sumber : Kominfo Kabupaten Bantul 2018

Pada tabel tersebut Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul dari 75 Desa dalam menggunakan Sistem Informasi Desa (SID) memiliki peringkat ke 2, dan di era *Tecnology* ini pemanfaatan SID sangat membantu dalam hal mempermudah pelayanan publik masyarakat Desa Murtigading.

Adapun permasalahan di Desa Murtigading ini tidak dioerlakukannya SID dalam pendaftaran pernikahan adapun desa tersebut masih menggunakan sistem manual (Tulis Tangan), dalam hal ini SID di Desa Murtigading dalam hal pelayanan publik khususnya dalam permasalahan pendaftaran pernikahan masih secara manual yaitu mengisi form pendaftaran pernikahan yang sebanyak 17 form, sehingga SID di Desa MURtigading ini masih kurang efektif karena masih menggunakan sistem manual (*Diolah Berdasarkan Wawancara di Pemerintah Desa Murtigading Tahun 2019*).

Selanjutnya adapun permasalahan di Desa Murtigading terkait dengan permasalahan perpindahan penduduk yang dimana masih menggunakan sistem

manual yang harus di isi sendiri. Adapun permasalahan tersebut harus pindah domisili terlebih dahulu dan harus mengisi beberapa form sehingga mempersulit pelayanan perpindahan domisili, maka dengan itu Sistem Informasi Desa di Murtigading ini masih kurang efektif dikarenakan dua hal permasalahan tersebut (*Diolah Berdasarkan Wawancara di Pemerintah Desa Murtigading Tahun 2019*).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis telah merumuskan masalah yaitu “Bagaimana Efektivitas Sistem Informasi Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Sistem Informasi Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber atau acuan informasi untuk mengembangkan Efektivitas Sistem Informasi Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana informasi bagi pemerintah dalam memaksimalkan efektivitas Sistem Informasi Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul.

1.5. Tinjauan Pustaka

NO	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Temuan
1	(Santi, 2012)	Sistem Informasi Rekapitulasi Pajak Di kantor Dinas Pendapatan Daerah Riau Menggunakan OLAP (<i>Online Analytical Processing</i>)	Mengemukakan sistem rekapitulasi akan membantu dalam meningkatkan suatu pekerjaan pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam merekapitulasi hasil pajak, waktu dan tenaga sangat dibutuhkan untuk merekapitulasi pajak agar mudah terorganisir

			dengan sangat baik dapat mengurangi resiko kehilangan data.
2	(Maharani, 2017)	Analisis Pemerintah Dalam Pelayan Publik Dengan Sistem Informasi Desa dan Kawasan Pemalang (SIDEKEM) (Studi Kasus di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang)	Melihat adanya sistem SIDEKEM yang menjadi tujuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk kebutuhan administrasi yang sangat erat dibutuhkan oleh masyarakat, dengan adanya sistem SIDEKEM ini pemerintah banyak mendapatkan manfaat untuk melaksanakan pelayanan publik, tidak sedikit juga kendala dalam sumber daya manusia yang masih belum bisa menguasai sistem SIDEKEM ini karena kurang ada kedisiplinan pegawai pada saat pelatihan yang diadakan oleh PUSPINDES.
3	Punama.B.E (2010)	Pembanguna Sistem Informasi Pendapatan Rakyat Miskin Untuk Program Beras Miskin (RASKIN) di Desa Mantren Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.	Pemerintah Desa Matren Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan ini membuat gagasan untuk masyarakat kecil yang dimana gagasan tersebut untuk membantu masyarakat miskin dengan program RASKIN (Beras Miskin). Akan tetapi program Raskin ini masih kurang efektif karena masyarakat miskin ini masih menggunakan sistem konvensional dan menyebabkan kertas tersebut menjadi hilang

			<p>kalau tidak merusak arsip. Maka dengan itu pemerintah Desa Mantren Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan ini menciptakan inovasi Teknologi Informasi, hal tersebut sangat membantu pemerintah dalam hal mendata masyarakat miskin dan meminimalisir permasalahan yang sebelumnya.</p>
4	(Kurniadi, 2014)	Rancang Bangun Aplikasi Sistem Pemilihan Kepala Desa yang Terintegrasi dengan SMS GATEWAY	<p>Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi kebutuhan terhadap teknologi informasi dan komunikasi tersebut sudah menjadi sarana di setiap harinya, maka semakin banyak juga sana media yang bertumbuh pesat. Berawal dari berkembangnya teknologi SMS maka terciptalah teknologi terbaru yang sering disebut <i>SMS GATEWAY</i>. <i>SMS GATEWAY</i> hadir sebagai sarana penyedia informasi berbasis SMS. Melihat seiring berkembangnya <i>SMS GATEWAY</i> pemerintah juga menggunakan sarana tersebut untuk alat pengelola informasi dan juga alat untuk menerima aspirasi masyarakat.</p>
5	Ulum (2010)	Sistem Informasi Pendaftaran	Informasi yang berbasis Web ini dirancang untuk

		Bimbingan Manasik Haji Berbasis <i>WEB</i> pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji An-nur Kudus	solusi bagi para calon jamaah haji dan untuk mempermudah pendaftaran bagi calon jamaah haji yang dilakukan dengan tepat dan cepat sehingga pekerjaannya dapat diwujudkan secara lebih maksimal.
6	(Andreas Andoyo, 2014)	Sistem Informasi Berbasis <i>WEB</i> pada Desa Tresnomaju Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran	Dengan ala yang terjadi saat ini sesuai dengan ketentuan yang ada maka pemerintah perlu untuk membangun sebuah sistem informasi dengan penerapan <i>E-Government</i> yang berbasis Web. Sistem <i>E-Government</i> yang berbasis Web memberikan pengaksesan informasi yang ada pada Desa Tresnomaju akan lebih mudah, cepat, tepat, dan akurat.
7	Mulyani, W., & Purnama, B. E. (2015).	Pembangunan Sistem Informasi Data Balita Pada Posyandu Desa Ploso Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan.	Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi petugas posyandu dalam melakukan pendataan secara manual, hal tersebut menjadi masalah seperti kesulitan proses pencarian data perkembangan balita karena terpisah-pisah yang menimbulkan inkonsistensi data tersebut. melihat situasi tersebut pemerintah Desa Ploso merubah dan mengembangkan pendataan yang tadinya manual menjadi sistem terkomputerisasi. Adanya perubahan pendataan terhadap balita

			memudahkan petugas mendapatkan data yang valid.
8	A. H., Amin, M. J., Si, M., Dama, M., Sos, S., & Si, M. (2017).	Efektivitas Kebijakan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Desa Dan Kelurahan (SI-DALEH) Di Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai.	Penelitian ini dilakukan untuk melihat pemerintah desa dalam melakukan suatu pelayanan publik yang memanfaatkan Sistem Informasi Desa sebagai strategi inovasi pemerintah, dalam hal ini pemanfaatan Sistem Informasi Desa mampu memberikan banyak manfaat dan menjadikan pemerintah lebih baik dalam melakukan pelayanan ke publik.
9	Herpendi (2017)	Sistem Informasi Desa di Kecamatan Takisung	Informasi mengenai kepengurusan kependudukan di Kecamatan Takisung didapatkan dengan cara datang langsung ke kantor kecamatan, kantor kelurahan, ketua RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga). Kepengurusan kependudukan tersebut meliputi: Akta Kelahiran, KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), Surat Pengantar dan Surat Keterangan lainnya.
10	Liputo, M.M.S (2015)	Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Desa Berbasis Web Model Government-to-	Penerapan e-Government Kelurahan Di Kantor Kelurahan Karampung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.

		Citizen	
--	--	---------	--

Dalam penelitian terdahulu sudah sangat jelas bahwa pemerintah harus menggunakan sistem informasi karena di zaman milineal ini masyarakat pada setiap harinya tidak lepas dengan internet dan selain itu pemanfaatan teknologi juga sebagai penguat tatakelola pemerintahan. Penelitian ini dapat dibedakan dengan pelayanan yang ada pada Desa Murtigading lebih fokus dalam meningkatkan pelayanan publik sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk mencari data-data, mendaftarkan akta nikah, dan mengurus kependudukan di desa Murtigading, selain itu dapat dibedakan dari segi teknologinya di Desa Murtigading ini sudah memiliki fasilitas dan Sumber Daya Manusia yang sangat cekat dalam memberikan pelayanan di masyarakat.

1.6. Kerangka Teori

Pada sub bab ini akan menjelaskan tentang definisi dan indikator yang digunakan untuk mengukur suatu variabel di dalam penelitian. Maka dari itu peneliti menggunakan teoro-teori sebagai berikut :

1.6.1. Efektivitas

Efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran suatu keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan-tujuannya. Efektivitas adalah suatu pencapaian untuk kerja yang maksimal dan mengarah pada produktivitas, yaitu pencapaian target yang berkaitan pada kualitas.

Menurut Pasolong (2007 : 4) Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan istilah itu digunakan sebagai hubungan yang menimbulkan sebab dan akibat. Efektivitas juga bisa dilihat sebagai suatu variabel yang lain. Efektivitas adalah suatu tujuan yang sudah direncanakan dapat direncanakan dan tercapai dengan adanya proses kegiatan yang dilakukan.

Menurut Mahmudi (2005 : 92). Efektivitas merupakan hubungan antar output dengan tujuan, semakin besar kontribusi output dengan pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan dinilai akan efektif apabila output yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang ditentukan sebelumnya.

Menurut Sanjaya (2015) efektivitas merupakan pencapaian sasaran atau tujuan suatu program atau kegiatan dengan memanfaatkan segala sumber daya secara efisien yang dapat ditinjau dari sisi input, proses maupun output dari program tersebut. Sumber daya yang dimaksud adalah hal ini berupa ketersediaan personil, sarana dan prasarana dalam melaksanakan program serta model dan metode yang digunakan. Suatu program atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila program atau kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan suatu hasil yang baik.

Menurut Mahmudi (dalam Damarika, 2016 : 10) dalam bukunya manajemen Sektor Publik definisi efektivitas adalah sebagai berikut : “efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”. Penilaian efektivitas berfokus pada *Outcome* (hasil) program atau

kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan oleh suatu program atau kegiatan tersebut dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Menurut Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut : “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasional kegiatan program atau misi)dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan, 2005 : 109)

Sedangkan menurut Hidayat (1986) efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu)telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang di capai semakin tinggi efektivitasnya.

Menurut Richard M Steers (1985 :8) dalam (Nurjannah, 2014) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi efektivitas, faktor-faktor tersebut yaitu :

a. Faktor Organisasi

Faktor organisasi tersebut merupakan hubungan yang sifatnya relatif seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat di dalam organisasi. Struktur memiliki cara yang unik memposisikan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.

b. Faktor Lingkungan

Disamping faktor organisasi, faktor kedua yang mempengaruhi efektivitas organisasi dilihat dari karakteristik lingkungan. Pengaruh lingkungan dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, lingkungan eksternal yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Kedua, adalah lingkungan internal yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.

c. Faktor Kerja

Karakteristik pekerja merupakan faktor yang paling mempengaruhi efektivitas. Di dalam diri setiap individu memiliki banyak perbedaan dengan individu lain, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan tersebut sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.

Sedangkan menurut Campbell (dalam Mutiarin 2014 : 96), mengungkapkan pengukuran efektivitas secara umum adalah :

- a. Keberhasilan Program
- b. Keberhasilan Sasaran
- c. Tingkat Input dan Output
- d. Pencapaian Tujuan Menyeluruh.

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah di tentukan sebelumnya.

Menurut Budiani dalam Khadafi (2015) mengemukakan bahwa terdapat beberapa variabel yang harus diperhatikan dalam melakukan pengukuran efektivitas, yaitu :

a. Ketetapan Sasaran Program

Dapat dilihat sejauh mana ketepatan antara sasaran yang sudah ditentukan dengan peserta yang terlibat di dalam program

b. Sosialisasi Program

Di dalam ini dapat dilihat sejauh mana kemampuan penyelenggaraan program di dalam melakukan sosialisasi program mengenai pelaksanaan program. Sehingga program dapat tersampaikan kepada sasaran program tersebut.

c. Pemantauan Program

Dalam hal ini pemantauan dilakukan setelah pelaksanaan program dengan tujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan dari program tersebut.

1.6.2. Sistem Informasi Desa

Sistem Informasi Desa menurut (Dewi:2011) yaitu suatu sekumpulan beberapa teknolog informasi dan perangkat lunak (*software*) yang dapat digunakan oleh perangkat pemerintah desa untuk mewujudkan dan mempermudah tingkat pelayanan publik untuk masyarakat.

Sistem Informasi Desa (SID) menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan. Dengan adanya perubahan paradigma pembangunan desa membuat SID menjadi penting perannya. Karena itu, perlu dikembangkan SID yang sesuai dengan visi UU Desa yakni menjadikan desa kuat, mandiri, sejahtera, dan demokratis. Oleh karenanya, SID diatur secara khusus dalam Undang-undang No 06 Tahun 2014 tentang desa, melalui pasal 86. Karena itu dalam pasal 86 ayat (2) dan ayat (5) mewajibkan kepada pemerintah dan desa untuk mengembangkan SID, dan pengelolanya dilakukan oleh Pemerintah Desa agar diakses oleh masyarakat desa dan pemangku kepentingan lainnya.

Menurut Hermansyah (2015) Sistem Informasi Desa adalah perangkat kerja/alat yang dibangun untuk mendukung peran komunitas di tingkat desa dalam pengelolaan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Sistem Informasi Desa terdiri dari beberapa bagian yang merupakan himpunan dari perangkat berbasis teknologi dan perangkat sosial yang di kelola dalam dinamika kehidupan komunitas/masyarakat di tingkat desa.

Menurut Ranggoaini, dkk., (2012) terdapat beberapa hal tindakan untuk diadakannya SID, antara lain :

1. Inkonsistensi Data

Kebutuhan untuk melindungi data atau dokumen di desa yang berbasis teknologi atau digital. Langkah yang dilakukan adalah memindah dokumen dari kertas (*Hardfile*) menjadi format digital.

2. Sulitnya Akses Data

Kebutuhan untuk mencari data kependudukan dan data desa secara singkat dan mudah.

3. Keamanan Data

Kebutuhan informasi yang bersifat keterbukaan (*Open Sourch*) dan tidak di tarik biaya agar tidak membebanni keuangan desa.

4. Kesatuan Data

Hasil data yang di dapat dari beberapa pihak (Pemerintah) tidak dibagikan ke desa. Dari berbagai pihak yang menjadi pelaku pendapatan tersebut juga tidak memiliki suatu indikator yang sama sehingga data-data tersebut tidak bisa diolah sebagai kebijakan yang terpadu.

SID juga memiliki dua arti sempit dan luas pengertian SID yang sempit yaitu aplikasi yang membantu pemerintah desa dalam hal menyimpan atau mendokumentasikan data desa agar tetap terjaga, Sedangkan pengertian SID yang luas yaitu suatu perangkat atau sistem yang bertujuan untuk mengolah sumber daya yang ada di suatu kelompok.(Ronggoaini Jahja dkk :2012)

Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) idealnya dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip penting (Media Keuangan Desa : 2015) diantaranya :

1. Sistem Informasi Desa adalah kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota;
2. Data yang dikelola melalui sistem informasi desa perlu ditetapkan sebagai data terbuka (Open data).
3. Sistem Informasi desa bukan semata teknologi, melainkan sumber daya manusia.
4. Penerapan Sistem Informasi Desa tidak boleh menghilangkan peluang, kesempatan dan upaya desa untuk membangun data yang relevan dengan kewenangan lokal berskala desa.
5. Penerapan Sistem Informasi Desa harus mengakomodir kebutuhan untuk tetap memiliki, mengembangkan dan menggunakan data sebagai bagian tidak terpisahkan dari perencanaan di tingkat desa.
6. Standarisasi data dalam informasi desa tidak boleh menghilangkan kesempatan pemerintah desa untuk mengembangkan data yang relevan terkait dengan kewenangan lokal berskala desa.
7. Penerapan teknologi tidak boleh ditinggalkan dengan mempertimbangkan akses masyarakat atas informasi pembangunan yang berbeda-beda di setiap lokasi.

1.6.3. Pelayanan Publik

Pelayanan publik menurut AG. Sudarsono (Agus Dwuyanto, 2005:141) yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk mewujudkan gagasan atau kebutuhan masyarakat yang menggunakan suatu fasilitas pemerintah.

Sedangkan menurut Joko Widodo(2001:131), pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian pelayanan keperluan di setiap warga yang memiliki kepentingan pada suatu organisasi yang sudah sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang sudah dijalankan.

a. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik

Prinsip-prinsip pelayanan publik menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik yaitu suatu kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sudah disediakan porsinya dengan perundang-undangan bagi di setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, ataupun pelayanan administratif yang sudah disiapkan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Sedangkan menurut Kepmenpan No. 63 Tahun 2003 pelayanan publik yaitu semua kegiatan pelayanan yang dijalankan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima hak pelayanan, pelayanan publik juga dapat di definisikan sebagai pemenuhan suatu kebutuhan pelayanan yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Indikator Kualitas Pelayanan Publik

Menurut Zeithhaml, Parasuraman & Berry(dalam Hardiansyah 2011:46) untuk mengetahui suatu kualitas dalam pelayanan publik itu akan di rasakan secara nyata oleh masyarakat yang menggunakan sarana tersebut, ada lima indikator kualitas pelayanan publik yaitu :

1. *Tangible* (Berwujud)
2. *Realiability* (kehandalan)
3. *Responsiviness* (ketanggapan)

4. *Emphaty* (Empati)

5. *Assurance* (Jaminan)

Berdasarkan lima indikator diatas masing-masing memiliki arti yang akan dijelaskan di bawah:

- a. Berwujud (*Tangible*): Kualitas pelayanan yang mengutamakan sarana fisik seperti perkantoran, administrasi, ruang tunggu, komputerisasi dan tempat informasi.
- b. Keandalan (*Realiability*): Kemampuan untuk mencapaikan suatu pelayanan sehingga dapat terpecaya.
- c. *Ketanggapan Responsiviness* (ketanggapan) : kemauan untuk bekerja dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat dan tanggap apa yang diinginkan konsumen.
- d. Empati (*Emphaty*): Sikap tegas tanggung jawab dan juga penuh perhatian dari pegawai kepada konsumen.
- e. Jaminan (*Assurance*) : Membuat kepercayaan terhadap konsumen dan harus memiliki kemampuan dan keramahan serta sopan santun.

1.6.4. Efektivitas Sistem Informasi

Menurut DeLone dan McLean (2003) Efektivitas Sistem Informasi adalah komponen sari kesuksesan sistem informasi mempunyai 6 dimensi, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, penggunaan,

kepuasan pengguna, dan keuntungan profit. Yang di definisikan sebagai berikut :

1. Kualitas Sistem, digunakan untuk mengukur kualitas sistem teknologi informasi. Kualitas sistem merupakan karakteristik yang diinginkan dari suatu sistem informasi, yaitu
 - a. Mudah digunakan, dimana penggunaan dapat lebih menguasai tata cara pengoperasian sistem tanpa perlu mengikuti latihan khusus. Jika pengguna telah mengerti bagaimana sistem dioperasikan, maka pengguna telah mengerti bagaimana sistem dioperasikan, maka pengguna dapat mengoperasikan sistem dengan lebih baik dan *user friendly*.
 - b. Kesesuaian, dimana pengguna merasa cocok dengan sistem informasi yang ada sehingga memutuskan untuk menggunakannya.
 - c. Ketersediaan, merupakan salah satu ketersediaan fitur-fitur dalam suatu sistem informasi sehingga memudahkan pengguna.
 - d. Waktu respon, merupakan waktu respons dari sistem yang diakses oleh pengguna. Kecepatan respons sistem dapat mempengaruhi sikap pengguna dalam menggunakan sistem tersebut.
 - e. Kegunaan, merupakan kegunaan dan fungsi dari menu yang terdapat dalam sistem informasi. Kemudahan bagi pengguna

dalam mengoperasikan menu dan fungsi yang disediakan sesuai dengan kebutuhan.

2. Kualitas informasi, mengukur kualitas keluaran dari sistem informasi. Kualitas informasi merupakan karakteristik yang diinginkan dari *output* sistem seperti laporan manajemen atau *website*, yaitu :
 - a. Mudah dimengerti, informasi yang ada pada sistem informasi dengan mudah dimengerti oleh pengguna.
 - b. Kelengkapan, sistem diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna.
 - c. Relevansi, dimana jika pengguna menggunakan suatu sistem, maka informasi yang diperoleh suatu sistem dapat terjamin keamanannya
 - d. Keamanan, informasi yang diperoleh dari suatu sistem dapat terjamin keamanannya.
 - e. Kekinian, informasi yang diperoleh merupakan informasi yang baru atau *up to date*.
 - f. Akurasi, informasi yang diperoleh sistem merupakan informasi yang akurat dan dapat di percaya.
3. Kualitas pelayanan, dalam hal ini mengukur kualitas pelayanan, suatu sistem informasi membutuhkan dukungan dari personel/staf dari organisasi. Kualitas pelayanan merupakan karakteristik yang diinginkan dari pelayanan sistem informasi, yaitu :

- a. Keandalan, merupakan kemampuan staf dalam menjalankan suatu sistem informasi yang memberikan layanan kepada pengguna sistem.
 - b. Empati, merupakan sikap dan kemauan yang ditunjukkan staf dalam memberikan pelayanan sistem informasi.
 - c. Responsiveness, merupakan kecepatan reaksi staf dalam menanggapi pengguna sistem informasi.
4. Penggunaan, mengukur pengguna keluaran/output suatu sistem informasi oleh pengguna. Penggunaan merupakan karakteristik dari tingkat dan cara dimana pengguna memanfaatkan kemampuan sistem informasi, yaitu :
- a. Frekuensi akses, seberapa sering pengguna menggunakan suatu sistem informasi.
 - b. Durasi, merupakan lama waktu penggunaan dalam menggunakan suatu sistem informasi.
5. Kepuasan pemakai, yaitu respons pemakai terhadap penggunaan keluaran sistem informasi. Tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem informasi, yaitu :
- a. Kepuasan terhadap perangkat sistem, merupakan tingkat kepuasan pengguna terhadap suatu sistem informasi.
 - b. Repeat, merupakan keinginan pengguna untuk kembali menggunakan sistem informasi.

6. *Net Benefit* (Keuntungan bagi organisasi), merupakan dampak dari informasi terhadap organisasi seperti profit bagi perusahaan, memangkas biaya operasional (*Coast effective*).

1.7. Definisi Konseptual

Fokus penelitian ini adalah Efektivitas Sistem Informasi Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, hal ini mengacu pada Undang-undang Desa no 4 Tahun 2014 pada pasal 86 di poin 1 sampai poin dan Permen Desa PDT Trans Nomor 22 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa pemerintah harus menyediakan layanan informasi bagi masyarakat, definisi konseptual penelitian ini adalah :

a. Efektivitas

Menurut Robbins (2008 : 129). Definisi dari efektivitas yaitu pengukur tingkatan organisasi dalam pencapaian yang perlakuannya dilaksanakan secara jangka pendek dan jangka panjang. Dengan maksud efektivitas ini sebagai pengukur keberhasilan suatu tujuan.

b. Sistem Informasi Desa

Sistem Informasi Desa menurut (Dewi:2011) yaitu suatu sekumpulan beberapa teknolog informasi dan perangkat lunak (*software*) yang dapat digunakan oleh perangkat pemerintah desa untuk mewujudkan dan mempermudah tingkat pelayanan publik untuk masyarakat.

c. Pelayanan Publik

Menurut Joko Widodo (2001 : 131) pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian pelayanan keperluan di setiap warga yang

memiliki kepentingan pada suatu organisasi yang sudah sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang sudah di jalankan.

d. Efektivitas Sistem Informasi

Menurut DeLone dan McLean (2003) Efektivitas Sistem Informasi adalah komponen sari kesuksesan sistem informasi mempunyai 6 dimensi, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan keuntungan profit.

1.8. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada variabel dengan cara menggunakan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Nazir, 1985:30). Adapun definisi tentang Efektivitas Sistem Informasi Desa dalam Meningkatkan Pelayanan publik di Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, adalah sebagai berikut :

Variabel	Indikator
Penggunaan	Frekuensi akses Durasi
Kualitas Sistem	Mudah Digunakan Kesesuaian Ketersediaan Waktu Respon Kegunaan
Kualitas Informasi	Mudah Dimengerti Kelengkapan Relevansi Keamanan Kekinian Akurasi
Kualitas Pelayanan	Keandalan Empati Responsiveness

Kepuasan Pengguna	Kepuasan Repeat/Penggunaan Kembali
Net Benefit	

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Menurut (Moleong, 2012:6) penelitian kualitatif dengan dimaksud melihat dan memahami suatu fenomena yang telah dialami dari suatu subjek penelitian, seperti persepsi, tindakan, holistic, dan motivasi dengan cara deskriptif yang telah digambarkan dengan jelas berbentuk kata-kata atau bahasa dengan menggunakan berbagai metode ilmiah. Metode analisis deskriptif kualitatif pada penelitian ini digunakan untuk memaparkan atau menggambarkan suatu peristiwa yang dapat diperoleh di lapangan dan untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data yang diperoleh dan bertujuan untuk memberikan penjelasan dari variabel yang diteliti. Dalam hal ini adalah memberikan gambaran tentang Efektivitas Sistem Informasi Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul.

1.9.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kantor Balai Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul.

1.9.3. Unit Analisis Data

Unit analisis data adalah satuan berupa individu, kelompok, benda atau latar peristiwa sosial seperti aktivis individu atau kelompok sebagai subjek

penelitian (Hamidi,2005). Unit analisa penelitian ini yaitu pemerintah Desa Murtigading yang telah mengaktifkan Sistem Informasi Desa untuk pelayanan publik masyarakat.

1.9.4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah semua data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara ilmiah melalui wawancara. Informan adalah sumber data yang berupa orang. Orang dalam penelitian ini dipilih dengan harapan dapat memberikan keterangan yang diperlukan untuk melengkapi atau memperjelas jawaban dari responden secara langsung (Arikunto, 2010). Adapun data primer dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 1.1

Data Primer

NO	Data	Sumber Data	Pengumpulan Data
1	Simulasi Sistem Informasi Desa	Pengelola SID	Wawancara
2	Efektivitas Sistem Informasi Desa	Pengelola SID	Wawancara
3	Hal yang sudah di terapkan menggunakan Sistem Informasi Desa	Pengelola SID	Wawancara
4	Fungsi atau Kegunaan Sistem Informasi Desa	Pengelola SID	Wawancara

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang sudah diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Data sekunder ini dapat diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai media seperti buku, artikel, jurnal, media massa, undang-undang, peraturan bupati, peraturan pemerintah, permendagri, dan lain-lain (Arikunto, 2010). Adapun data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu :

Tabel 1.2
Data Sekunder

No	Data	Sumber Data
1	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Dokumentasi
2	Peraturan Desa Murtigading Nomor 4 Tahun 2016	Dokumentasi
3	Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017	Dokumentasi

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana wawancara merupakan percakapan tatap muka atau secara langsung antara pewawancara dengan narasumber, dimana pewawancara bertanya langsung tentang objek yang diteliti dan telah direncana sebelumnya (Yusuf,2014:372).

Teknik wawancara ini bersifat terbuka, tidak terstruktur dan tidak formal. Pada tahapan wawancara dengan sumber informasi atau narasumber merupakan orang yang bisa dianggap mengerti ataupun ampun untuk memberikan data. Maka metode tersebut digunakan untuk mendapatkan data secara langsung kepada objek

penelitian terkait Evaluasi Pengembangan Sistem Informasi Desa untuk Mewujudkan Pelayanan Publik di Desa Murtigading.

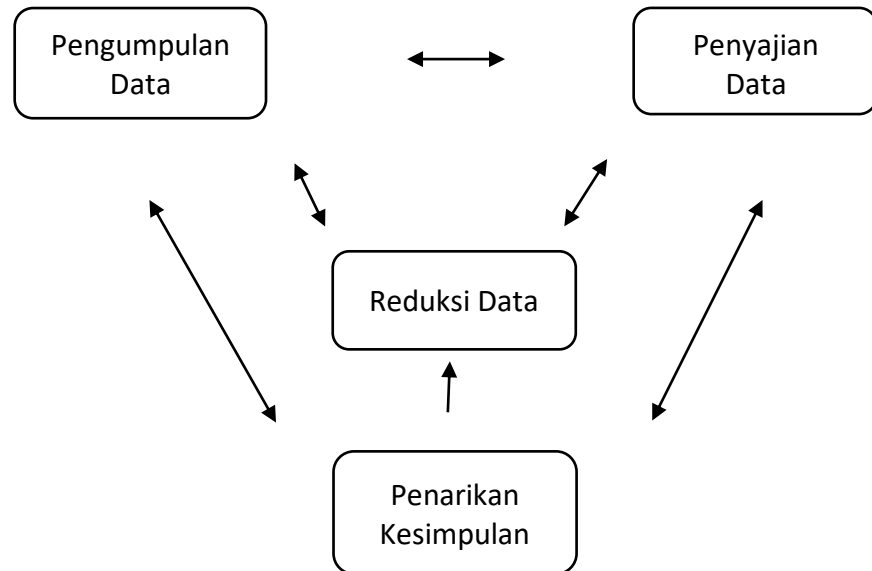
b. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan atau suatu karya seseorang yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat amat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berupa teks tertulis, *artefacts*, gambar maupun foto. Dokumen tertulis dapat pula berupa sejarah kehidupan (*Life historis*), biografi, karya tulis cerita. Disamping itu ada pula material budaya, atau hasil karya seni yang merupakan sumber informasi dalam penelitian kualitatif (Yusuf,2014: 391).

Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh fakta mengenai kebenaran yang valid. Karena objek yang menjadi sasaran penelitian dapat dipertanggung jawabkan dengan fakta yang ada. Dokumen dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui data-data dan memperoleh arsip-arsip di Pemerintahan Desa Murtigading.

1.9.6. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data menurut Patton (2012:280) adalah suatu proses kategori urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, membedakan dalam penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisa, menjelaskan suatu pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Gambar 1.3**Bagan Komponen Analisis Model Interaktif**

(Sumber: Miles dan Huberman, 1992)

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari data yang dibutuhkan di lapangan oleh peneliti dengan metode yang sudah ditentukan, dan juga pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

b. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan membuat sebuah ringkasan.

c. Penyajian Data

Kumpulan data atau informasi yang tersusun secara sistematis untuk pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan. Penyajian secara kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif selain itu juga dapat berbentuk diagram, tabel, bagan dan matriks.

d. Kesimpulan

Peneliti menarik kesimpulan terhadap data yang diperoleh dan yang telah di reduksi dalam bentuk laporan dengan cara membandingkan, menghubungkan dan memilih data yang mengarah pada permasalahan serta mampu menjawab permasalahan yang ada sehingga dapat menimbulkan kesimpulan yang benar dan valid.